

ABSTRAK

Penghindaran pajak menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi penerimaan negara dan turut berkontribusi terhadap stagnasi tax ratio di Indonesia khususnya. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak menjadi penting dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CEO power, koneksi politik, dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. CEO power pada penelitian ini diukur dengan akumulasi tiga dimensi yaitu masa jabatan, kepemilikan saham, dan tingkat pendidikan, koneksi politik diukur dengan melihat jumlah pejabat yang merangkap jabatan di kementerian atau institusi negara, struktur kepemilikan merupakan persentase kepemilikan institusional pada BUMN, dan CSR diukur dengan melihat persentase pengungkapan pada laporan keberlanjutan perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BUMN selama periode tahun 2020-2023 dan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CEO power berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan koneksi politik dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi terbukti memperlemah pengaruh negatif CEO power terhadap penghindaran pajak, tetapi tidak mampu memperkuat pengaruh negatif koneksi politik dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi regulator dalam menyusun kebijakan perpajakan, khususnya dalam mempertimbangkan karakteristik CEO sebagai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan.

Kata kunci: *penghindaran pajak, CEO power, koneksi politik, kepemilikan institusional, corporate social responsibility*

ABSTRACT

Tax avoidance is one of the obstacles in optimizing state revenue and contributes to the stagnation of the tax ratio in Indonesia in particular. Therefore, understanding the factors that influence tax avoidance is important in formulating more effective tax policies. This study aims to analyze the effect of CEO power, political connections, and ownership structure on tax avoidance with corporate social responsibility as a moderating variable. CEO power in this study is measured by the accumulation of three dimensions, namely tenure, share ownership, and education level, political connections are measured by looking at the number of officials who concurrently hold positions in ministries or state institutions, ownership structure is the percentage of institutional ownership in SOE (State-Owned Enterprise), and CSR is measured by looking at the percentage of disclosures in the company's sustainability report concerned. This study uses a quantitative methodology with secondary data obtained from the official website of SOE during the 2020-2023 period and analyzed using multiple linear regression methods. The results showed that CEO power has a negative effect on tax avoidance while political connections and institutional ownership have no effect on tax avoidance. In addition, CSR disclosure as a moderating variable is proven to weaken the negative effect of CEO power on tax avoidance, but is unable to strengthen the negative effect of political connections and institutional ownership on tax avoidance. The findings of this study have important implications for regulators in formulating tax policies, especially in considering CEO characteristics as a factor that can affect corporate tax compliance.

Keywords: *tax avoidance, CEO power, political connection, institutional ownership, corporate social responsibility*